

(LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INTANSI

PEMERINTAH  
TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS





# DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 .....	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. PENGUKURAN KINERJA .....	9
B. ANALISIS KINERJA .....	9
C. REALISASI ANGGARAN.....	14
D. ANALISIS EFISIENSI.....	15
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>16</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023	8
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021	9
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023	15
Tabel 3.3	Analisis Efisiensi	15



## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja/LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS**

**MUHAMMAD ADI PRANOTO, SE,MM**

NIP. 19800508 201001 1 019



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023, merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan selama 12 bulan, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan suatu realisasi pelaksanaan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka penyelenggaraan “good governance”. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu *action plan* dalam rangka merealisasikan visi Dinas yang telah ditetapkan, yaitu: “Terwujudnya Sistem Transportasi Kabupaten Bengkalis yang Handal dalam mendukung Sistem Transportasi Wilayah dan Nasional”.

Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bengkalis, Dinas Perhubungan telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026) dengan Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan di Kabupaten Bengkalis yang mendukung kinerja dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan (2021 – 2026) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan Transportasi Umum;
2. Meningkatkan akses Transportasi antar Daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Transportasi;
4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan

Dari tujuan tersebut pada tahun 2023 dapat ditetapkan Sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai penjabaran tujuan secara kuantitatif yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan 1 (Satu) Indikator Kinerja yaitu :
  - a) Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum dengan target 22.595.
2. Meningkatnya Kapasitas Angkutan Penyeberangan dengan 2 (Dua) Indikator kinerja yaitu :
  - a) Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan dengan target :
    1. Orang : 1.100.000
    2. Barang : 36.000
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Pelabuhan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi Layak Operasi dengan target 100.
4. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan target nilai BB.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program/ kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkalis dengan Jumlah kegiatan sebanyak 3 (Tiga) Program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.021.939.525,00,- terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 102.676.320.124,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.025.615.270,00,- atau 78,91 % dan alokasi anggaran belanja Pegawai sebesar Rp. 16.345.629.401,00,- dengan realisasinya sebesar Rp. 13.849.475.561,00,- atau 84,73%.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab, termasuk penataan perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis terletak pada salah satu pulau yang berada diwilayah timur Propinsi Riau adalah satu diantara 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang merupakan Kabupaten induk setelah beberapa kali dilakukan pemekaran sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, serta Kota Madya Dumai, dan pada tahun 2009 dilakukan pemekaran lagi dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang Perhubungan (transportasi), perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera**”. Oleh karena itu, dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau

*stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan akan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2022.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian



Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Kabupaten Bengkalis , dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di jalan Pramuka Bengkalis, adalah Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perhubungan (Sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi), yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selain sebagai abdi negara juga sebagai abdi masyarakat, antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan juga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas untuk masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mengupayakan agar prosedur pengerahan sumber daya yang meliputi sistem manajemen, sarana/fasilitas dan tenaga personil dapat ditingkatkan dengan lebih baik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Perhubungan yang bersifat teknis dan fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan perturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.
- e. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis.

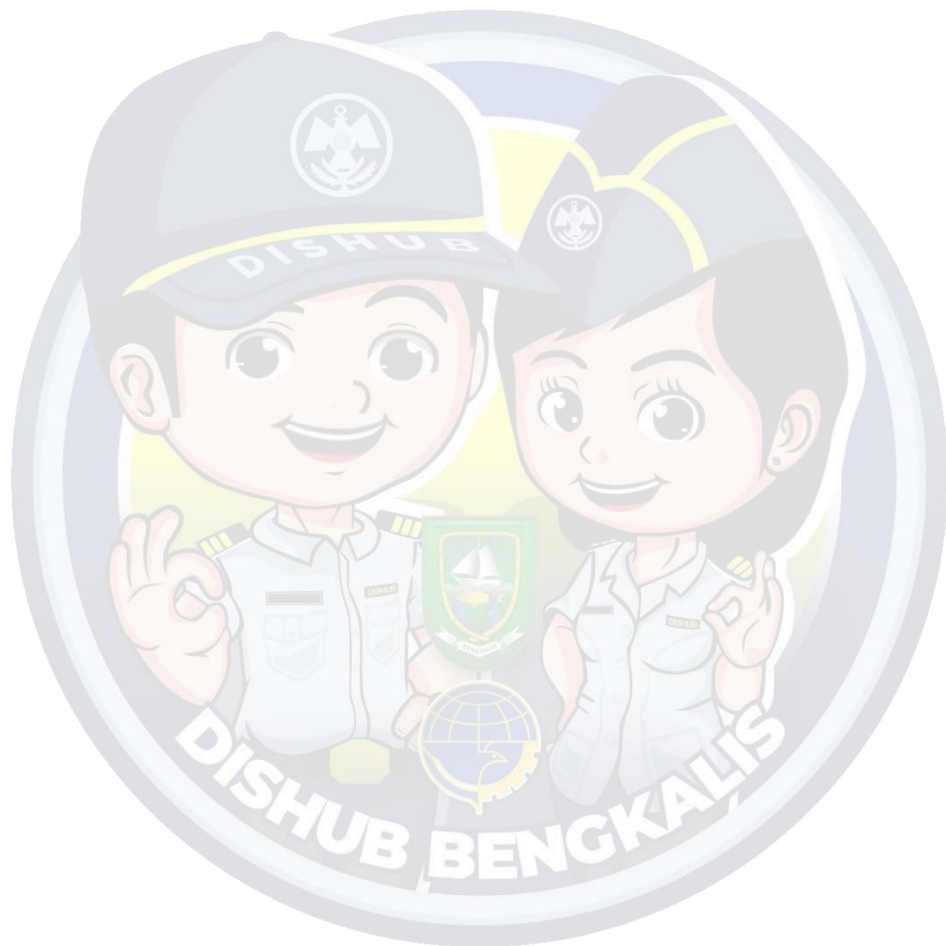
#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (Empat) Bidang dan 8 UPT Teknis sebagai berikut :

- 1. Sekretariat**, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Bidang Lalu Lintas Jalan**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi rekayasa dan dampak lalu lintas, operasional jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3. Bidang Angkutan dan Pemadu Moda**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi angkutan orang dalam trayek dan Terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang dan perencanaan serta pengembangan angkutan;
- 4. Bidang Kepelabuhan**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan Pelabuhan;
- 5. Bidang Pelayaran**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi Badan Usaha dan Jasa terkait



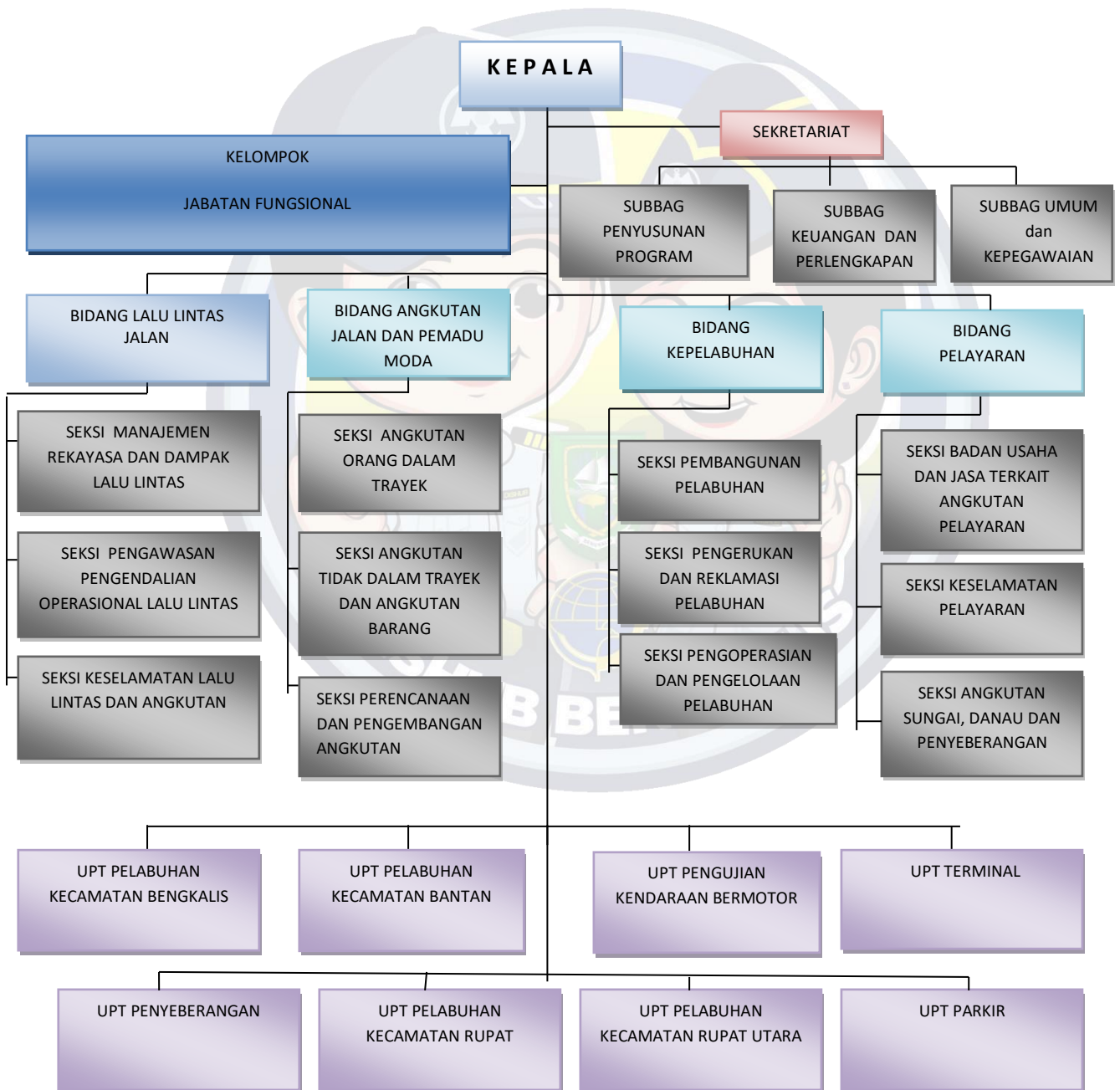
Angkutan pelayaran, Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN,  
KABUPATEN BENGKALIS**

Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor : 99 Tahun 2021.



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

### A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

**Tabel 2.1**  
Rencana Strategis

Sasaran	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum	21.203	21.899	22.595	23.291	23.987	24.683
	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	21	21	22	23	23	24
	Rasio Izin Trayek	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003
Meningkatnya Kapasitas Angkutan Penyeberangan	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan						
	a. Orang b. Barang	910.000 28.800	950.000 32.400	1.100.000 36.000	1.200.000 39.600	1.300.000 43.200	1.350.000 46.800
Meningkatnya Kualitas Layanan Pelabuhan	Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi Layak Operasi	95	98	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	BB	BB	A	A	A

Sumber : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

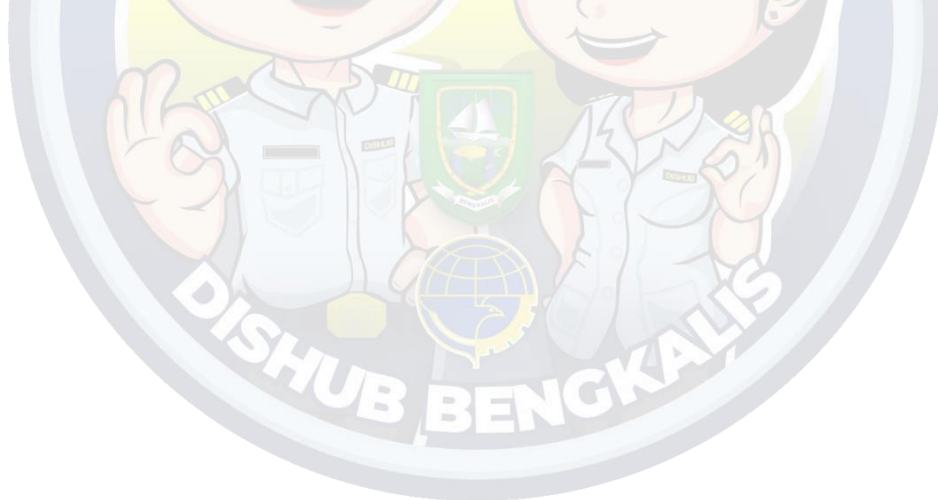
## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

**Tabel 2.2**

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum	22.595
2.	Meningkatnya Kapasitas Angkutan Penyeberangan	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan a. Orang b. Barang	1.100.000 36.000
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pelabuhan	Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi Layak Operasi	100
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun 2023





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

### A. Pengukuran Kinerja

**Tabel 3.1**

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis  
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum	22.595	17.236	76,28 %
2.	Meningkatnya Kapasitas Angkutan Penyeberangan	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan a. Orang b. Barang	1.100.000 36.000	1.320.086 71.567	120,01 % 198,80 %
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pelabuhan	Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi Layak Operasi	100	80	80 %
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	BB	100 %

### B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mengalami penurunan Capaian Kinerja, dari 4 indikator untuk 4 sasaran, 3 indikator dikatakan dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya  $\geq 90\%$  dari target yang telah ditetapkan, sedangkan yang lainnya 2 (dua) indikator yang ditetapkan capaiannya dibawah 90%. Adapun

uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

## SASARAN 1

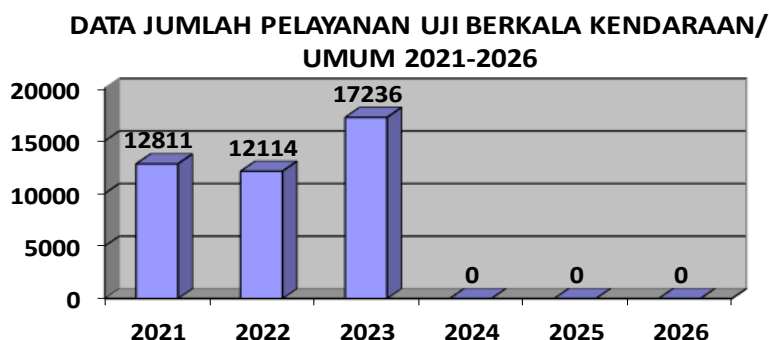
### Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2026
	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum	55,32%	22.595	17.236	76,28%	69,83%
<b>Rata - rata capaian</b>				76,28%	69,83%

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan target Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum sebesar 22.595, dan telah terealisasi sebesar 17.236 dengan capaian 76,28%, hasil capaian ini belum memenuhi target yang diharapkan dan dalam jumlah pelayanan uji berkala kendaraan/ Umum terjadi Kenaikan yakni tahun 2023 sebesar 17.236 dibandingkan tahun lalu yakni sekitar 12.114.

Berikut grafik Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum selama periode 2021-2026 :



- a) Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya Jumlah Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum :
- Kualitas Pelayanan yang ditingkatkan seiring waktu berjalan.
  - Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Petugas yang melakukan Uji Berkala Kendaraan melalui Ujian Kompetensi.
  - Dinas Perhubungan melakukan Uji Berkala Kendaraan Keliling.
- b) Faktor-faktor yang menghambat Pelayanan Uji Berkala Kendaraan/ Umum :
- Keterbatasan Alat Uji Berkala Kendaraan.
  - Kurangnya Kualitas dan Kompetensi Petugas yang melakukan Uji Berkala Kendaraan.
  - Terbatasnya Kendaraan Uji Berkala Kendaraan Keliling.

## SASARAN 2

### Meningkatnya Kapasitas Angkutan Penyeberangan.

Sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2022	2023			Capaian 2022 terhadap 2026
	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan					
a. Orang	978.134	1.100.000	1.320.086	120,01 %	97,78 %
b. Barang	60.116	36.000	71.567	198,80 %	152,92 %
<b>Rata - rata capaian</b>				159,41 %	125,35 %

Kemudahan dalam melakukan mobilitas orang maupun barang merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh sarana maupun fasilitas transportasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang, pada



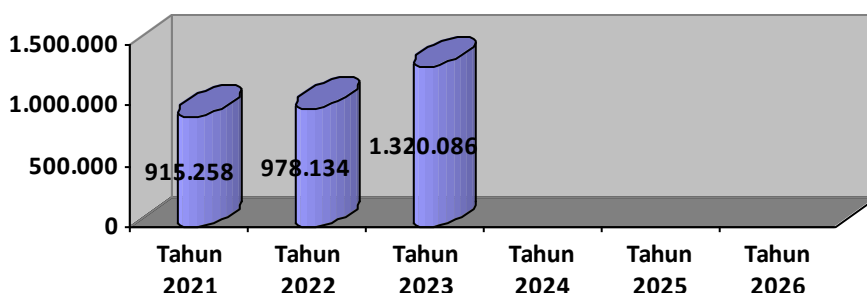
angkutan umum darat dan laut dibutuhkan pembangunan serta peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan dalam pengelolaan transportasi angkutan umum di suatu daerah ialah dengan melihat arus pergerakan penumpang orang dan barang yang menggunakan angkutan umum baik itu angkutan darat maupun angkutan laut.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan menargetkan Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan, Orang sebesar 1.100.000 dan Barang sebesar 36.000 dan telah terealisasi Orang sebesar 1.320.086 dengan capaian 120,01% dan Barang sebesar 71.567 dengan capaian 198,80%. Persentase Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan ini dapat di hitung dengan melihat besaran peningkatan jumlah penumpang orang atau barang dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penumpang orang/barang tahun ini}}{\text{Jumlah target penumpang orang/barang tahun ini}} \times 100$$

Pada tahun 2023 capaian kinerja pada indikator Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan mengalami peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2022, hal ini disebabkan pandemi covid-telah berakhir dan dibuka nya kembali Pelabuhan Utama domestik di Kabupaten Bengkalis yakni Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja sehingga pergerakan penumpang ataupun barang mengalami kenaikan melalui pelabuhan tersebut, hal ini dapat dilihat Pada tahun 2023 ini Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan dikabupaten bengkalis berjumlah 1.320.086 orang, jumlah ini jauh naik dibandingkan tahun lalu sebesar 978.134 orang.

**Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan penyeberangan dari tahun 2021-2026**



### SASARAN 3

#### **Meningkatnya Kualitas Layanan Pelabuhan.**

Pelayanan prima dalam hal penyediaan sarana transportasi yang aman dan nyaman serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan jasa transportasi terus di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Peningkatan pelayanan tersebut dibuktikan dengan upaya membangun fasilitas – fasilitas yang menunjang kemudahan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi baik fasilitas di pelabuhannya maupun fasilitas pendukung lainnya.

Sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2026
	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi Layak Operasi.	80	100	80	80 %	80 %
<b>Rata - rata capaian</b>				80 %	80 %

### SASARAN 4

#### **Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah**

Baik ataupun buruknya kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja suatu instansi pemerintah daerah, tidak terlepas dari kinerja dan kecakapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan Program dan kegiatan yang telah dibuat dan di sahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan selaku OPD yang melayani masyarakat dalam bidang transportasi berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2026
	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100 %	BB	BB	100 %	
<b>Rata - rata capaian</b>				100 %	

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar BB dan telah terealisasi sebesar BB dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja yang di peroleh untuk indikator Sasaran ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

### C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 94.875.090.831,00,- atau sebesar 79,71% dari pagu sebesar Rp. 119.021.949.525,00-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Keempat (4) yakni Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah yaitu penyerapan anggarannya sebesar 86.17% dengan nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.579.394.574,00 dari target sebesar Rp. 58.028.753.459,00. Sementara penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran ketiga (3) yakni Meningkatkan Kualitas Layanan Pelabuhan yaitu 60,29%. Dengan nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.595.917.658,00 dari target sebesar Rp. 25.867.539.000,00. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2023 sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran**

Sasaran	Rata - rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan		58.028.753.459,00-	48.579.394.574,00,-	83,72
Meningkatnya Kapasitas Angkutan Penyeberangan		29.015.140.000,00-	18.740.230.258,00,-	64,59
Meningkatnya kualitas layanan Pelabuhan		25.867.529.000,00-	15.595.917.658,00,-	60,29
Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah		31.978.046.066,00-	27.555.483.999,00,-	86,17
<b>Total</b>		<b>119.021.939.525,00-</b>	<b>94.875.108.831,00,-</b>	<b>79,71</b>

#### **D. Analisis Efisiensi**

Terdapat dari 2 (empat) sasaran kinerja yang direncanakan, capaian kinerja indikator yang > 90% hanya terdapat 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan penyeberangan dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan capaian 159.41% dan 100%, sehingga dapat di analisa bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Analisis Efisiensi**

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan	76,28 %	48.579.394.574,00,-	
2.	Meningkatnya sarana dan Meningkatkan Kapasitas Angkutan Penyeberangan a. Orang b. Barang	120,01 % 198,80 %	18.740.230.258,00,-	
3.	Meningkatnya kualitas layanan Pelabuhan	80 %	15.595.917.658,00,-	
4.	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	27.555.483.999,00,-	

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2023 yang tercermin pada indikator sasaran. Secara umum sasaran dan indikator kinerja mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang diharapkan. Hal ini terlihat dari 4 indikator dengan 4 sasaran yang diperjanjikan, terdapat 2 indikator yang dikategorikan berhasil.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memenuhi indikator kinerja yang belum mencapai target maka akan di tindaklanjuti ditahun yang akan datang, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan proses lelang kegiatan di ULP sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat segera di laksanakan dan selesai tepat waktu.;
2. Peningkatan kualitas aparatur Perhubungan;
3. Berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pembuatan dokumen – dokumen laporan yang mendukung penilai kinerja OPD seperti Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD sehingga penilaian akuntabilitas OPD semakin membaik.
4. Akan berusaha mengoptimalkan dan segera menindaklanjuti setiap temuan – temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan BPK maupun Inspektorat terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.